

Dana Jamkesmas Diduga Disalahgunakan

TOUNA - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Tojo Unauna (Touna), Abd Fatah Maloto menyatakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Touna diduga telah menyalahgunakan penggunaan dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) tahun 2010.

Tahun 2010 kata Fatah, Kementerian Kesehatan telah memberikan bantuan Jamkesmas kepada masyarakat Touna. Dana tersebut dikelola oleh Dinkes Touna yang diperuntukkan kepada 12 Puskesmas. Dana itu, sebagai jasa pelayanan terhadap masyarakat miskin yang berjumlah 67.732 or-

ang yang tersebar di Touna. "Dasar pemberian bantuan dana tersebut oleh Kemenkes RI, untuk perkapita Rp1.000 dikali 1 tahun dikali jumlah masyarakat miskin, berarti berjumlah Rp812.784.000. Itu bersumber dari APBN tahun 2010

● Baca DANA Hal 14

Kadinkes Tidak Takut Dibawa ke Ranah Hukum

+ ■ **Dana ...**
Sambungan dari hal...16

yang telah dianggarkan oleh pusat setiap tahunnya dengan nama bantuan sosial (bansos) Jamkesmas," tutur Fatah kepada *Radar Sulteng* di Kantor DPRD Touna, belum lama ini.

Kata dia, dana Jamkesmas tahun 2010 itu, melalui rekening masing-masing puskesmas dan penerimaan melalui kantor pos se Kabupaten Touna berjumlah 12 puskesmas. Kepala Dinkes Touna sebut Fatah, diduga telah memotong 3 persen, sedangkan juknis tidak membenarkan. Bahkan, ada lagi pemotongan 40 persen yang tidak jelas.

Kata dia, sisa dana tahun 2009 berjumlah Rp410 juta lebih, sesuai data yang dikeluarkan oleh kantor pos Ampana tanggal 4 Juli 2011. Untuk Puskesmas Marowo, dana yang tersisa sekitar Rp26 juta lebih, Puskesmas Uekuli Rp29 juta, Puskesmas Ampana Barat Rp16 juta lebih serta beberapa Puskesmas lainnya seperti Puskesmas Dolong dan Dataran Bulan juga ada yang tersisa.

Fatah menyebutkan, diduga terjadi perbedaan data mengenai jamkesmas tahun 2010 antara data di Dinas

Kesehatan dengan data yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Cabang Ampana, sehingga kuat dugaan ada pelanggaran hukum. am"Diperkirakan kerugian negara sementara Rp93 juta lebih," kata Fatah lagi sembari menegaskan bahwa rilis yang dikeluarkan DPC LAKI Touna itu merupakan bahan laporan yang disampaikan kepada Kapolda Sulteng Dewa Parsana.

Terpisah, Kepala Dinkes Touna, dr Rahman membantah berbagai tuduhan penyalahgunaan dana Jamkesmas tersebut. Ditemui *Radar Sulteng*, Senin kemarin (22/8) Rahman menegaskan, 3 persen yang disebut oleh LAKI dipotong, merupakan bagian dari pembagian jasa medik. Bagian 3 persen itu ujar Rahman, tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinkes Touna atas kesepakatan antara kepala dinas, sekretaris dinas, bidang-bidang serta bendahara puskesmas. "Dana sebesar 3 persen tersebut untuk dana taktis dari jasa pelayanan. Jadi, bukan dari keseluruhan dana Jamkesmas. Dan itu bukan untuk dinas, tapi untuk puskesmas," terang dia.

Rahman menceritakan, SK Kepala Dinkes yang

menyangkut pedoman dana taktis itu, diawali atas permintaan beberapa puskesmas yang meminta pembagian dana taktis. Olehnya itu, disepakatilah pengaturan jasa medik. "Dana itu, saya tidak pernah campuri. Keliru kalau disebut dana 3 persen dipotong dari keseluruhan jumlah dana jamkesmas. Karena itu dari dana penerimaan kesehatan/jasa medik. Itu bukan hanya di Jamkesmas, tapi seluruh penerimaan puskesmas. SK itu hanya jadi pedoman, selanjutnya masing-masing mengambil kebijakan atas pedoman itu," tutur Rahman.

Terkait dengan pemotongan 40 persen lanjut dia, tidaklah demikian. Dana secara keseluruhan masuk ke kas daerah secara bruto sebagai pendapatan. Lagi pula, sampai hari ini (kemarin,red) dana 60 persen belum bisa ditarik. Seperti yang disebut LAKI jutaan dana Puskesmas yang tidak dikembalikan oleh Dinas Kesehatan kepada beberapa Puskesmas. "Enam puluh persen ditarik untuk jasa medis. Sementara sisanya masih tetap berada di kas daerah," sebut dia.

Dana di pos masih sifatnya bansos, klaim dana dari

puskesmas itulah yang dikeluarkan oleh kantor pos. Dana tersebut tidak disimpan di rekening bendahara dinas, tapi langsung ke kas daerah. "Aliran dananya bisa dilihat di kas daerah. Silakan dicek. Di mana tersisih uangnya? Saya jamin 100 persen tidak ada dana yang tersisih. Untuk 2011, disimpan di kas puskesmas masing-masing, daripada saya pusing. Dana itu sifatnya dititip," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Rahman menekankan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan dana Jamkesmas telah diperiksa oleh Inspektorat Touna dan BPK RI. Kedua instansi tersebut telah melakukan pemeriksaan, dan hasilnya ujar Rahman, tidak ada masalah.

Dia tidak takut apabila kasus ini dibawa ke ranah hukum sebagai konsekuensi atas jabatan yang disandanginya. Dirinya yakin yang dilakukannya tidak bertentangan dengan hukum. "Saya sangat yakin apa yang saya lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Silakan lihat hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI tentang penggunaan dana Jamkesmas Touna tahun 2010," demikian Rahman. (sut)